

Tim Pemantau, Terus Bergerak

Pembentukan Tim Pemantau Kasus Novel ialah langkah maju di tengah mandeknya upaya hukum dari aparat kepolisian.

RICHALDO Y HARIANDJA
richaldo@mediaindonesia.com

WAKIL Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyatakan berlarutnya pengungkapan pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan menjadi alasan dibentuknya Tim Pemantau Kasus Novel. Apalagi, setiap orang berhak mendapat perlakuan sama di depan hukum.

"Dalam kasus ini, proses lambat tersebut punya dampak banyak. Selain pada rasa keadilan korban, juga pada banyak hal, seperti bukti hilang dan lainnya," ucap Sandra yang juga Ketua Tim Pemantau Kasus Novel kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Tim Pemantau Kasus Novel, lanjut dia, terus bergerak mencari tahu penyebab kelambatan itu. Jangan sampai penyelesaian kasus itu terus berlarut-larut sehingga akan menjauhkan keadilan bagi Novel yang menjadi korban penyiraman air keras.

Ja menambahkan, Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan pimpinan KPK terkait kerja Tim Pemantau Kasus Novel. Sandra pun menyatakan Tim Pemantau Kasus Novel sudah berkoordinasi secara informal dengan aparat kepolisian.

"Semua koordinasi masih dalam proses, toh kepolisian sudah kami beri tahu

secara informal dan pasti dia (kepolisian) sudah tahu ada tim ini," tukas Sandra.

Langkah maju

Inisiatif Komnas HAM membentuk Tim Pemantau Kasus Novel Baswedan diapresiasi. Upaya itu dinilai sebagai langkah maju di tengah mandeknya upaya hukum yang dijalankan aparat dan negara.

Apalagi, Presiden juga masih belum mau membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk membantu kepolisian. Padahal, desakan itu datang dari banyak pihak.

Penyelesaian ada di kepolisian karena rekomendasi tim itu tidak berkekuatan hukum.

"Kasus Novel Baswedan ini harus diselesaikan bukan karena menyangkut Novel pribadi, melainkan itu merupakan teror terhadap penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi," ucap pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

Terlebih, lanjut dia, kasus itu sudah lebih dari 9 bulan tidak terselesaikan. Dirinya menyatakan masyarakat



ANTARAHAFIDZ MUBARAKA

TIM PEMANTAUAN KASUS NOVEL: Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan, Sandrayati Moniaga (kiri) dan anggota tim Mohammad Choirul Anam (kedua dari kiri), tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/3). Tim yang dibentuk Komnas HAM mendatangi KPK guna membahas perkembangan kasus teror dan penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

tidak mengerti kendala sebenarnya yang dialami kepolisian. Menurutnya, ada beban psikologis yang dialami oleh para penegak hukum dalam kasus Novel Baswedan.

Akan tetapi, ia menilai tidak ada beban psikologis Tim Pemantau Kasus Novel. "Diharapkan semua masukan dari investigasi

yang dilakukan oleh tim tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian tanpa beban psikologis," tukas dia.

Abdul Fickar mendorong kepolisian nantinya dapat menjalankan rekomendasi yang dihasilkan oleh tim dibentuk Komnas HAM. "Mudah-mudahan kepolisian setelah mendapatkan data dan informasi dari Tim

Pemantau Kasus Novel mau dengan sungguh-sungguh menyelesaikan kasus Novel Baswedan ini seperti juga menyelesaikan kasus-kasus lainnya dengan baik," ucap dia.

Dirinya menilai penyelesaian akhir tetap berada di kepolisian. Pasalnya, rekomendasi yang dihasilkan tidak akan memiliki

kekuatan hukum.

Komnas HAM, lanjutnya, bukan penegak hukum yang dapat menangani semua kasus pidana. Kewenangan Komnas hanya mencakup penyelidikan dan penyidikan kasus HAM berat. "Tergantung itikad baik kepolisian sebagai lembaga negara yang dibiayai uang rakyat." (P-3)

Harta Cagub Maluku Utara Rp35 Miliar

CALON Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia terjerat kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Seram, Tahun Anggaran 2009 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp3,4 miliar.

Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ditilik dari laman resmi acch.kpk.go.id, kemarin, Bupati Kepulauan Sula, itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 14 April 2013. Total kekayaan mencapai Rp35.212.963.348 dan US\$110 ribu.

Harta kekayaan itu mencakup harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, dia memiliki 19 tanah dan bangunan yang tersebar di lima daerah, yakni Kepulauan Sula, Bogor, Jakarta, Minahasa, dan Manado. Jika diuangkan, harta itu bernilai Rp21.500.227.500.

Untuk harta bergerak, Ahmad tercatat memiliki 12 alat transportasi. Dia mempunyai 1 Toyota Land Cruiser, 2 Toyota Alphard, mobil Mercedes Benz, 2 Toyota Harrier, 1 Range Rover, 1 BMW, 1 Honda CR-V, dan 2 Hammer.

Tak hanya mobil, politikus Partai Golkar itu juga diketahui memiliki satu *speed boat*. Bila diduitkan, ke-13 alat transportasi itu bernilai Rp4.525.000.000.

Sebelumnya, Ahmad dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus (ZM) diduga kuat terlibat pengadaan tanah fiktif untuk Bandara Bobong, Kabupaten Sual. Kasus ini merupakan hasil supervisi dengan Polda Maluku Utara. "Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan koordinasi dengan BPK ialah sebesar Rp3,4 miliar, sesuai dengan pencairan kas daerah," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/3) silam.

Pengamat hukum Universitas Khairun Ternate, King Faisal Soleman, menilai penetapan tersangka Ahmad Hidayat Mus oleh KPK tidak tepat. "AHM belum pernah diperiksa. Ini jelas tidak sesuai dengan hukum acara," katanya di Ternate, akhir pekan lalu.

Penetapan AHM sebagai tersangka, lanjut Faisal, bisa menimbulkan keagaduhan di masyarakat. "Bahkan bisa mengganggu proses demokrasi di Maluku Utara." (MTVN/An/P-3)